

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penguatan dan percepatan pembangunan serta pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto antara tahun 2008 – 2012 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,95 %. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari semua komponen pendapatan. Tahun anggaran 2008 realisasi pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 23.441.989.586 dan meningkat menjadi Rp.34.887.767.757,- pada tahun anggaran 2012. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 12,92 %. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,95 %, yaitu meningkat dari Rp. 236.072.560.612 pada tahun anggaran 2008 menjadi Rp. 317.637.773.012,- pada tahun anggaran 2012.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto dimana pertumbuhan rata-ratanya sebesar 90,93 %, dimana pada tahun anggaran 2008 lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 10.886.441.790 dan menjadi Rp. 35.885.894.000,- pada tahun anggaran 2012. Terjadi kenaikan yang cukup besar

pada dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 50.810.615.600 sedangkan tahun sebelumnya Rp. 9.940.179.600 karena adanya dana penyesuaian infrastruktur daerah (DIPD).

Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan penurunan retribusi pada tahun 2008–2012 hanyalah disebabkan karena adanya perubahan pencatatan pendapatan daerah karena berubahnya status RSUD menjadi BLUD. Sebelum tahun 2008 penerimaan RSUD dicatat sebagai retribusi daerah dan setelah tahun 2008 penerimaan RSUD dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Melihat komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah yaitu sebesar 81,78 % pada tahun 2012 sehingga untuk kelancaran pembangunan kota sangat tergantung dari bantuan keuangan dari pusat. Untuk itu, pada masa yang akan datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri sehingga proporsi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan pendapatan daerah akan meningkat.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO, TAHUN 2008 – 2012

NO	URAIAN	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
	PENDAPATAN	270.400.991.988	273.491.988.194	313.373.773.343	390.092.080.172	388.411.434.769	9,95
A	Pendapatan Asli Daerah	23.441.989.586	26.532.985.791	23.782.088.436	36.382.150.723	34.887.767.757	12,92
1	Pajak Daerah	1.535.693.645	1.595.546.610	1.932.701.833	2.320.146.288	2.969.920.454	18,28
2	Retribusi Daerah	13.611.889.452	13.891.964.054	11.781.537.158	3.822.298.255	2.295.581.904	(30,16)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.835.566.483	3.036.898.430	3.416.520.961	6.633.070.554	6.763.117.937	28,93
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.458.840.006	8.008.576.697	6.651.328.484	23.606.635.626	22.859.147.462	70,38

NO	URAIAN	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
B	Dana Perimbangan	236.072.560.612	236.072.560.612	239.611.107.627	273.921.926.757	317.637.773.012	7,95
1	Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15.213.304.412	15.213.304.412	18.462.028.627	22.708.276.757	28.439.344.012	17,40
2	Dana Alokasi Umum	187.631.256.200	187.631.256.200	202.073.979.000	225.119.750.000	268.961.519.000	9,64
3	Dana Alokasi Khusus	33.228.000.000	33.228.000.000	19.075.100.000	26.093.900.000	20.236.910.000	(7,63)
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.886.441.790	10.886.441.790	49.980.577.280	79.788.002.692	35.885.894.000	90,93
1	Hibah	4.472.100.000	4.472.100.000	15.749.000	9.000.000	10.020.000	(32,79)
2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
3	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	6.016.741.790	6.016.741.790	7.404.578.730	11.914.840.092	11.289.150.000	19,68
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	9.940.179.600	50.810.615.600	24.086.724.000	-
5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	397.600.000	397.600.000	-	-	-	-
6	Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan	-	-	32.620.069.950	17.053.547.000	-	-
7	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	500.000.000	-

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.1.2 NERACA DAERAH

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban/utang dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi Pemerintah Daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal akan terjadi peningkatan aset tetap daerah. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan, maka akan terjadi

penurunan investasi jangka panjang, pengurangan dana cadangan, atau kenaikan kewajiban.

Berdasarkan neraca Kota Sawahlunto tahun anggaran 2008 terlihat bahwa komposisi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan dengan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 85,57 % aset tetap, 4,97 % aset lancar dan 9,46 % investasi jangka panjang. Komposisi aset lancar mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2011 menjadi 9,99 % disebabkan meningkatnya kas di kas daerah serta peningkatan piutang dari tahun sebelumnya serta bertambahnya kas pada BLUD yang dikelola secara otonom.

Aset yang dimiliki Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari Rp. 517.098.335.730 tahun anggaran 2008 menjadi Rp. 825.323.898.551,- pada tahun anggaran 2012, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,44 %. Peningkatan ini dihasilkan antara lain melalui belanja modal setiap tahunnya, peningkatan aset lancar dan peningkatan investasi jangka panjang. Namun sampai saat ini Kota Sawahlunto tidak memiliki dana cadangan karena belum dilakukan penyisihan anggaran untuk pembangunan kedepan. Sedangkan aset lainnya baru pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp.16.274.728.998,- karena adanya tuntutan ganti kerugian daerah Rp. 47.187.500,- aset tidak berwujud Rp. 73.728.000,- serta aset lain-lain Rp. 16.153.813.498,-

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana per tahun sebesar 12,23 %. Sedangkan untuk kewajiban terjadi pertumbuhan yang sangat besar yaitu dengan rata-rata per tahun sebesar 1.182,80 % hal ini disebabkan utang pemerintah Kota Sawahlunto kepada pemerintah pusat. Tabel 3.2 berikut menyajikan jumlah dan pertumbuhan rata-rata aset, kewajiban dan ekuitas dana.

TABEL 3.2
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
KOTA SAWAHLUNTO, TAHUN 2008 – 2012

Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
ASET						
Aset Lancar	25.663.554.363	35.979.579.467	40.035.171.393	75.553.359.362	55.415.805.834	28,39
Investasi Jangka Panjang	48.960.012.903	50.753.388.232	62.900.377.289	66.010.492.289	84.542.149.522	15,15

Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
Aset Tetap	442.474.768.463	494.696.059.526	542.684.667.771	614.375.153.924	669.091.214.196	10,91
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-	16.274.728.998	-
JUMLAH ASET	517.098.335.730	581.429.027.226	645.620.216.454	755.939.005.575	825.323.898.551	12,44
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	-	-	417.018.066	254.732.550	862.830.466	99,86
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	5.516.979.776	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	417.018.066	254.732.550	6.379.810.242	1.182,80
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	22.343.554.363	35.979.579.467	39.618.153.327	75.298.626.812	54.552.975.368	33,41
Ekuitas Dana Investasi	494.754.781.367	545.449.447.759	605.585.045.060	680.385.646.213	764.391.112.941	11,50
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	517.098.335.730	581.429.027.226	645.203.198.388	755.684.273.025	818.944.088.309	12,23
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	517.098.335.730	581.429.027.226	645.620.216.454	755.939.005.575	825.323.898.551	12,44

Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Sawahlunto dapat dilakukan analisis rasio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rasio, rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rasio keduanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya aset atau aset bersih digunakan.

Berdasarkan analisis rasio lancar (current ratio), untuk tahun 2010 rasio lancar sebesar 96,00 artinya pemerintah Kota Sawahlunto mampu melunasi hutang jangka pendeknya sebanyak 96 kali pada saat jatuh tempo, 296 kali pada tahun 2011 dan

64 kali pada tahun 2012. Untuk quick ratio, setelah aset lancar dikurangi dengan persediaan maka kemampuan pemerintah Kota Sawahlunto dalam melunasi hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo 88 kali pada tahun 2010, 277 kali pada tahun 2011 dan 58 kali pada tahun 2012.

Sedangkan rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap total ekuitas tidak sampai 1 %, artinya kewajiban pemerintah Kota Sawahlunto tidak sampai 1 % dibandingkan dengan total aset dan total ekuitas dana, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

TABEL 3.3
ANALISIS RASIO KEUANGAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rasio lancar (current ratio)	-	-	96,00	296,60	64,23
2	Rasio quick (quick ratio)	-	-	88,51	277,92	58,63
3	Rasio total hutang terhadap total asset	-	-	0,0007	0,0004	0,0078
4	Rasio hutang terhadap modal	-	-	0,0007	0,0004	0,0078

Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pengklasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan anggaran berdasarkan output yang dihasilkan. Menurut Keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak

langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang atau jasa yang dihasilkan.

Belanja pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun anggaran 2008 s.d tahun anggaran 2012 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,60 %. Pada tahun anggaran 2008 realisasi jumlah belanja Rp. 278.259.409.443 dan pada akhir tahun anggaran 2012 menjadi Rp. 384.784.967.785. Pada tahun anggaran 2008, realisasi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dimana belanja langsung sebesar Rp. 152.583.173.078 sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 125.676.236.364. Sedangkan tahun anggaran 2009 – 2012 belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.

Pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata per tahun adalah 14,15 %, yaitu dari Rp. 125.676.236.364,- pada tahun anggaran 2008 menjadi Rp. 212.682.269.452,- pada tahun anggaran 2012. Analisis elemen pembentuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai untuk belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai dan adanya kenaikan gaji pokok pegawai, belanja bantuan sosial juga termasuk penyumbang besarnya belanja tidak langsung, walaupun pada tahun anggaran 2012 terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun dari elemen belanja tidak langsung yang tertinggi pada belanja bagi hasil dimana rata-ratanya sebesar 35,36 %. Pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp.3.967.947.400 menjadi Rp.11.539.258.935,- pada tahun 2012 hal ini disebabkan meningkatnya belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun untuk belanja langsung dalam kurun waktu tahun anggaran 2008 – 2012 sebesar 4,08 %. Pertumbuhan komponen belanja langsung yang terbesar terjadi untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal, untuk belanja pegawai mengalami kenaikan yang tidak begitu besar.

Dari penjelasan diatas terlihat pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta memperhitungkan kewajiban daerah dalam belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan sebagainya. Selain itu juga harus memperhitungkan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya

rapat, koordinasi, honorarium non PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenisnya yang dalam penganggarnya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi, seperti terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

TABEL 3.4
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA
KOTA SAWAHLUNTO, TAHUN 2008 – 2012

N o	Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	125.676.236.364	152.389.168.871	174.647.450.427	193.261.663.399	212.682.269.452	14,15
1	Belanja Pegawai	100.713.088.040	118.213.108.783	153.299.711.552	168.804.889.474	187.742.271.859	17,10
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	69.420.236	-
3	Belanja Subsidi	527.160.000	740.316.620	1.013.324.881	1.448.730.594	32.574.953	5,63
4	Belanja Hibah	4.158.288.850	17.306.373.637	2.313.708.720	1.822.991.500	8.063.648.725	74,87
5	Belanja Bantuan Sosial	10.489.157.188	7.437.175.406	8.617.407.022	10.593.450.191	30.000.000	(22,51)
6	Belanja Bagi Hasil	3.967.947.400	4.511.591.700	4.301.665.252	5.935.302.500	11.539.258.935	35,36
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.389.395.000	2.823.950.000	2.986.819.000	3.171.631.500	3.453.345.744	9,76
8	Belanja Tidak Terduga	3.431.199.886	1.356.652.725	2.114.814.000	1.484.667.640	1.751.749.000	(4,10)
B	Belanja Langsung	152.583.173.078	126.432.315.439	133.466.083.959	164.860.159.023	172.102.698.333	4,08
1	Belanja Pegawai	29.667.866.653	26.895.986.150	15.632.580.962	21.012.837.214	25.039.609.475	0,59
2	Belanja Barang dan Jasa	54.444.587.444	57.482.925.471	63.209.950.138	73.175.977.163	79.306.326.411	9,92
3	Belanja Modal	68.470.718.981	42.053.403.818	54.623.552.859	70.671.344.646	67.756.762.447	4,14
	Total Belanja	278.259.409.443	278.821.484.310	308.113.534.386	358.121.822.422	384.784.967.785	8,60

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2008 – 2012, kebijakan belanja aparatur menunjukkan kebijakan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada realisasi belanja untuk aparatur sebesar Rp. 227.036.820.000 pada tahun 2008 menjadi Rp.

299.968.040.000,- pada tahun 2012 atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,50 %.

Peningkatan terbesar untuk belanja aparatur ini terutama pada belanja gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, hal ini sebagaimana diterangkan diatas terjadi karena adanya kenaikan gaji pokok pegawai serta penerimaan pegawai baru. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan terbesar terjadi pada belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

TABEL 3.5
REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	100.713.080.000	118.213.350.000	153.207.680.000	168.804.890.000	187.742.260.000	17,10
1	Belanja gaji dan tunjangan	79.452.870.000	95.065.270.000	106.687.400.000	121.129.920.000	131.070.530.000	13,41
2	Belanja tambahan penghasilan	20.100.780.000	22.159.340.000	43.995.110.000	46.518.760.000	55.044.690.000	33,22
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	894.950.000	804.250.000	2.332.890.000	814.500.000	1.313.750.000	176,14
4	Belanja pemungutan pajak daerah	264.480.000	184.490.000	192.280.000	341.710.000	107.010.000	(4,25)
5	Insentif pemungutan pajak daerah	-	-	-	-	206.280.000	-
B	Belanja Langsung	126.323.740.000	102.674.040.000	97.103.070.000	123.313.800.000	112.225.780.000	(1,54)
	Belanja pegawai	43.958.500.000	43.364.370.000	23.222.860.000	30.496.080.000	19.070.310.000	(13,48)
	Belanja beasiswa pendidikan PNS	-	328.780.000	142.030.000	141.130.000	240.930.000	42,29
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	2.984.300.000	3.269.080.000	2.529.580.000	4.902.070.000	20,54
	Belanja premi asuransi kesehatan	1.179.380.000	466.720.000	194.550.000	820.450.000	-	67,66
	Belanja makanan dan minuman pegawai	4.496.430.000	4.067.780.000	4.308.160.000	5.984.010.000	4.485.680.000	2,56
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.000.610.000	1.175.050.000	1.235.070.000	1.293.050.000	189.080.000	(14,53)
	Belanja pakaian kerja khusus dan hari-hari tertentu	243.580.000	274.300.000	562.440.000	381.030.000	1.322.080.000	83,10
	Belanja perjalanan dinas	6.974.520.000	7.959.340.000	9.545.330.000	10.962.170.000	13.839.820.000	18,79
	Belanja perjalanan pindahtugas	-	-	-	-	-	-
	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	34.950.000	419.050.000	-

No	Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
	Belanja modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	68.470.720.000	42.053.400.000	54.623.550.000	70.671.350.000	67.756.760.000	4,14
	Total	227.036.820.000	220.887.390.000	250.310.750.000	292.118.690.000	299.968.040.000	7,50

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja dan pembiayaan terjadi sedikit fluktuasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari kurun waktu 2008 – 2012. Pada tahun 2008 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 81,60 % turun menjadi 79,23 % pada tahun 2009. Meningkat 81,24 % pada tahun 2010 dan 81,57 % tahun 2011, pada tahun 2012 turun menjadi 77,96 %.

TABEL 3.6
PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun anggaran 2008	227.036.820.000	278.259.409.443	81,60
2	Tahun anggaran 2009	220.887.390.000	278.821.484.310	79,23
3	Tahun anggaran 2010	250.310.750.000	308.113.534.386	81,24
4	Tahun anggaran 2011	292.118.690.000	358.121.822.422	81,57
5	Tahun anggaran 2012	299.968.040.000	384.784.967.785	77,96

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari analisis tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.

3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2008 – 2012 menunjukkan bahwa lebih besar belanja daripada pendapatan kecuali tahun anggaran 2010 dan 2011.

TABEL 3.7
SURPLUS (DEFISIT) RIIL ANGGARAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2008 – 2012

No	Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012
1	Realisasi Pendapatan Daerah	270.400.991.988	273.491.988.194	313.373.773.343	390.092.080.172	388.411.434.769
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	278.259.409.443	278.821.484.310	308.113.534.386	358.121.822.422	384.784.967.785
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	77.000.000	1.511.031.579	3.655.522.000	3.304.000.000	19.611.000.000
A	Surplus (Defisit) Riil	(7.935.417.454)	(6.840.527.694)	1.604.716.957	28.666.257.750	(15.984.533.016)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	24.298.871.635	18.967.806.634	31.555.676.675	33.160.893.632	62.031.987.236
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

No	Uraian	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	24.298.871.635	18.967.806.634	31.555.676.675	33.160.893.632	62.031.987.236
B + A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	16.363.454.180	12.127.278.939	33.160.393.632	61.827.151.383	46.047.454.220

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2.3 DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH (DOFD) KOTA SAWAHLUNTO

Pengukuran derajat otonomi fiskal daerah merupakan pengukuran terhadap kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tolok ukur kemampuan keuangan daerah ini dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD dengan tolok ukur sebagai berikut :

TABEL 3.8
TOLOK UKUR DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH (DOFD)

DOF = PAD/APBD (%)	KRITERIA
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,10 - 20,00	Kurang
20,10 - 30,00	Sedang
30,10 - 40,00	Cukup
40,10 - 50,00	Baik
dias 50,00	Sangat Baik

Sumber : Kerjasama Litbang Depdagri dengan Fisipol UGM

Menggunakan tolok ukur diatas, dapat didapat derajat otonomi Fiskal daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2008 s/d 2012 sebagai berikut :

TABEL 3.9
DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH (DOFD) KOTA SAWAHLUNTO
2008 – 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	PAD	23.441.989.586	26.532.985.791	23.782.088.436	36.382.150.723	34.887.767.757
2	APBD	104.973.810.000	121.269.340.000	135.659.740.000	139.343.860.000	154.734.260.000
3	DOFD	22,33	21,88	17,53	26,11	22,55
kriteria DOFD		Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Sedang

Sumber : Data Olahan DPPKAD

Dari analisis diatas, diketahui bahwa derajat otonomi fiskal daerah Kota sawahlunto berada pada kriteria **Sedang**. Hanya pada tahun 2010 DOFD tersebut berada padaa kriteria Kurang, hal ini disebabkan melemahnya pendapatan Daerah yang terjadi secara regional di Sumatera Barat. Selain faktor dampak ekonomi secara global, faktor dampak gempa bumi juga sangat mempengaruhi. Akan tetapi, pada tahun 2011, DOFD Kota Sawahlunto kembali pada level **Sedang**, yang disebabkan oleh kembali stabilnya kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh di Sumatera Barat. Meningkatnya kunjungan ke Objek Wisata serta mulai berproduksinya hasil pertanian yang dirintis sejak tahun 2004 juga ikut mempengaruhi hal ini.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan dan belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat berarti pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bias tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Kota Sawahlunto tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja dewan dan kepala daerah, belanja bunga, bagi hasil serta belanja langsung; belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja jasa kantor.

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang besar, yaitu Rp. 104.973.810.000 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp. 154.734.260.000. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,29 %, sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

TABEL 3.10
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KOTA SAWAHLUNTO,
TAHUN 2008 – 2012

N o	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumb uhan Rata- Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	84.315.770.000	100.381.130.000	113.321.960.000	127.879.720.000	143.992.960.000	14,35
1	Belanja gaji dan tunjangan	79.452.870.000	95.065.280.000	106.687.400.000	121.129.920.000	131.070.530.000	13,41
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	894.950.000	804.250.000	2.332.890.000	814.500.000	1.313.750.000	176,14
3	Belanja bunga	-	-	-	-	69.420.000	-
4	Belanja bagi hasil	3.967.950.000	4.511.600.000	4.301.670.000	5.935.300.000	11.539.260.000	35,36

N o	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumb uhan Rata- Rata (%)
B	Belanja Langsung	20.658.040.000	20.888.210.000	22.337.780.000	11.464.140.000	10.741.300.000	(11,73)
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	Na	Na	Na	Na	Na	-
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	-	328.780.000	142.030.000	141.130.000	240.930.000	4,43
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	20.658.040.000	20.559.430.000	22.195.750.000	11.323.010.000	10.500.370.000	(12,20)
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-	-
	A + B + C	104.973.810.000	121.269.340.000	135.659.740.000	139.343.860.000	154.734.260.000	10,29

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kota Sawahlunto dalam periode 2008 – 2012 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun sebelumnya, serta dengan memperhitungkan dampak pembangunan secara nasional dan regional Sumatera Barat, diproyksikan pengeluahran daerah Kota Sawahlunto tetap akan mengalami kenaikan dalam lima tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisa, pengeluaran wajib dan mengikat tersebut dapat diproyeksikan sebagai berikut :

TABEL3.11
PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2013 – 2018

NO	URAIAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	213.641,64	244.969,09	276.210,43	311.472,18	351.273,43	396.200,49
1	Belanja Gaji dan Tunjangan, tamb. Penghasilan	199.584,25	222.937,86	251.919,78	284.669,35	321.676,37	363.494,30
2	Belanja Anggota DPRD serta Oprs Kepala Daerah	1.318,89	3.575,88	4.112,26	4.729,10	5.438,47	6.254,24
3	Belanja Bunga	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
4	Belanja Bagi Hasil	11.513,50	17.230,35	18.953,39	20.848,72	22.933,60	25.226,96
B	BELANJA LANGSUNG	12.830,70	13.399,85	14.072,73	15.451,84	16.764,20	19.866,80
1	Belanja Honor PNS Khusus Guru dan Tenaga Medis	na	na	na	na	na	na
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	292,75	235,00	249,64	937,60	1.524,25	3.864,85
3	Belanja Jasa Kantor (tagihan bulanan seperti air listrik telepon)	12.537,95	13.164,85	13.823,09	14.514,24	15.239,96	16.001,95
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada Kontrak Jangka Panjang)	-					
5	Belanja Sewa Perlengkapan yang telah ada kontrak jangka panjangnya	-					
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	1.166,70	1.166,70	1.166,70
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-			1.166,70	1.166,70	1.166,70
	JUMLAH	226.472,34	258.368,94	290.283,16	328.090,72	369.204,34	417.233,99

Sumber : Data Olahan DPPKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat lima tahun kedepan terlihat pengeluaran yang terbesar masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Akan tetapi, melihat perkembangan jumlah pegawai yang sudah relatif tetap, angka ini diproyeksikan meningkat hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan gaji PNS. Untuk belanja anggota DPRD dan kepala daerah

peningkatan belanja ini disebabkan meningkatnya semua harga kebutuhan pokok kepala daerah dan anggota DPRD di daerah. Selain itu belanja bunga dan belanja bagi hasil juga akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Proyeksi meningkatnya pengeluaran wajib dan mengikat ini tentunya harus diseimbangkan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut bersifat tertutup, artinya pemerintah daerah tidak dibenarkan membuat kebijakan untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi daerah selain dari apa yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut. Dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ada objek pendapatan asli daerah yang baru dan ada juga yang dihapus. Namun bagi Kota Sawahlunto dengan berlakunya undang-undang tersebut dapat menaikkan jumlah PAD, namun mengakibatkan pengurangan pendapatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada sumber pendapatan daerah yang pada awalnya merupakan pajak pemerintah pusat yang dibagikan kepada pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil yang jumlahnya cukup besar menjadi pajak daerah yang potensi di daerah sangat kecil seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dari segi pajak daerah, selama periode tahun 2008 – 2012, pajak daerah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 18,28 % dan diperkirakan akan meningkat cukup signifikan pada tahun 2014 karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014 akan dialihkan menjadi pajak daerah, disamping akan meningkatnya pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan karena semakin meningkatnya kunjungan wisata ke Sawahlunto.

Penerimaan retribusi daerah, selama periode 2008 – 2012 meskipun secara pencatatan mengalami pertumbuhan yang negatif, namun sebetulnya tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan semenjak tahun 2011 pendapatan dari RSUD yang dicatat sebagai retribusi daerah dipindahkan menjadi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, karena adanya perubahan status RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedepan retribusi daerah ini tetap akan mengalami peningkatan terutama yang akan mengalami peningkatan yang cukup besar adalah Retribusi Pelayanan Pasar khususnya pasar Sawahlunto yaitu mulai dioperasionalkannya pasar Sawahlunto tahun 2014.

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 28,93 %.

Peningkatan ini disebabkan karena semakin besarnya deviden Bank Nagari serta bagian laba dari PT WWS yang diterima. Kedepan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut akan mengalami peningkatan dengan ditambahkan penyertaan modal pemerintah Kota Sawahlunto ke Bank Nagari serta semakin besarnya keuntungan PT WWS dan diperkirakan kedepan Hotel Parai yang merupakan aset daerah juga akan memperoleh keuntungan sehingga akan ada bagian laba yang akan diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk lain-lain PAD yang Sah selama periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan dan kedepan akan tetap meningkat. Kecuali untuk insentif PBB tidak lagi kita terima mulai tahun 2014 yang tentunya akan mengurangi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2014 tersebut dan setelah itu akan tetap mengalami peningkatan terutama untuk penerimaan bunga dan BLUD RSUD Sawahlunto.

Selanjutnya terhadap Dana Perimbangan, untuk Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2008 – 2012 hanya meningkat rata-rata sebesar 0,60 %. Rendahnya peningkatan ini disebabkan karena tidak adanya lagi dana bagi hasil BPHTB sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami rata-rata peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan penerimaan royalty batubara. Untuk kedepan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ini tetap meningkat, namun peningkatan ini relatif kecil karena semakin berkurangnya produksi batubara di Sawahlunto.

Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode 2008 – 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,64 % per tahun sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar (7,63) %. Untuk kedepan pertumbuhan DAU dan DAK diperkirakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya sepanjang tidak ada perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah, selama periode 2008 – 2012 yang terdiri dari Dana Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Percepatan Pembangunan Daerah yang diterima oleh Kota Sawahlunto sangat bervariasi dan ada yang tidak setiap tahun diterima seperti Dana Hibah. Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Penyesuaian terutama untuk tunjangan sertifikasi guru PNS rutin diterima setiap tahun. Untuk kedepan pendapatan yang meningkat diperkirakan hanya dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan untuk Dana Penyesuaian berupa tunjangan sertifikasi guru hanya meningkat sedikit seiring dengan bertambahnya guru yang bersertifikasi.

Untuk Dana Hibah tahun 2014 akan menurun secara signifikan karena kemungkinan tidak ada lagi Dana Hibah dari luar negeri yang akan diterima setelah selesainya program air bersih oleh AusAid.

Berdasarkan gambaran diatas, maka diperkirakan proyeksi pendapatan daerah tahun 2013 – 2018 dapat terlihat pada tabel 3.9 berikut ini.

TABEL 3.12
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2013 – 2018

No	Uraian	Pertumbuhan Rata-Rata (%)		Proyeksi					
		2008 - 2013	Penyesuaian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
A	Pendapatan Asli Daerah			39.155.302.500	41.824.162.625	44.711.655.006	47.839.342.144	51.231.244.547	54.914.149.140
1	Pajak Daerah	18,28	15,00	2.815.950.000	3.238.342.500	3.724.093.875	4.282.707.956	4.925.114.150	5.663.881.272
2	Retribusi Daerah	(30,16)	5,00	2.416.016.000	2.536.816.800	2.663.657.640	2.796.840.522	2.936.682.548	3.083.516.676
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	28,93	10,00	8.590.000.000	9.449.000.000	10.393.900.000	11.433.290.000	12.576.619.000	13.834.280.900
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	70,38	5,00	25.333.336.500	26.600.003.325	27.930.003.491	29.326.503.666	30.792.828.849	32.332.470.292
B	Dana Perimbangan			348.001.640.121	379.397.198.767	413.752.566.717	451.350.159.948	492.499.517.652	537.539.919.669
1	Dana bagi Hasil Pajak	0,60	1,00	13.514.052.823	13.649.193.351	13.785.685.285	13.923.542.138	14.062.777.559	14.203.405.335
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	157,60	5,00	7.487.754.768	7.862.142.506	8.255.249.632	8.668.012.113	9.101.412.719	9.556.483.355
3	Dana Cukai Tembakau	(4,60)	15,00	295.212.530	339.494.410	390.418.571	448.981.357	516.328.560	593.777.844
4	Dana Alokasi Umum	9,64	9,70	296.397.490.000	325.148.046.530	356.687.407.043	391.286.085.527	429.240.835.823	470.877.196.898
5	Dana Alokasi Khusus	(7,63)	6,90	30.307.130.000	32.398.321.970	34.633.806.186	37.023.538.813	39.578.162.991	42.309.056.237
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			49.166.475.478	47.660.477.512	49.802.494.838	52.106.301.290	54.587.027.722	57.261.296.305
1	Hibah	8.759,50	5,00	3.534.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
2	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	19,68	10,00	11.864.275.050	13.050.702.555	14.355.772.811	15.791.350.092	17.370.485.101	19.107.533.611
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	154,10	5,00	32.115.568.928	32.757.880.307	33.413.037.913	34.081.298.671	34.762.924.644	35.458.183.137
4	Bantuan	56,80	10,00	1.652.631.500	1.817.894.650	1.999.684.115	2.199.652.527	2.419.617.779	2.661.579.557

No	Uraian	Pertumbuhan Rata-Rata (%)		Proyeksi					
		2008 - 2013	Penyesuaian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
	Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya								
5	Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan		-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			436.323.418.099	468.881.838.904	508.266.716.562	551.295.803.382	598.317.789.723	649.715.365.113

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto, Data Diolah

Jika pada awal tahun 2013 masih tersedia SILPA sebesar Rp. 40.000.000.000,- sehingga kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2013 diperkirakan mencapai jumlah Rp. 249.851.078.099. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya kapasitas riil keuangan daerah mengalami kenaikan, sehingga pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah Rp. 282.031.665.113.

TABEL 3.13
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, TAHUN 2013 – 2018

No	Uraian	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Pendapatan	436.323.418.099	468.881.838.904	508.266.716.562	551.295.803.382	598.317.789.723	649.715.365.113
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
	Dikurang						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	226.472.340.000	258.368.937.500	290.283.156.175	328.090.722.602	369.204.336.437	417.233.993.046
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	206.786.000.000	250.512.902.500	257.983.563.825	263.205.077.397	269.113.453.562	272.481.376.954

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto, Data Diolah

